

Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik dan Demokrasi di Indonesia

Khusnul Khatimah, Alhamdani, Vega Selvia, Anita Sugiyarti, Muhammad Gilang Maulana, Muhammad Luthfi Setiarno Putra

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

e-mail: khusnulmuhaimin17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik dan demokrasi di Indonesia. Media sosial, sebagai platform interaktif yang luas jangkauannya, telah menjadi medium penting untuk diskusi politik dan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu publik. Penelitian ini menggunakan analisis konten, dengan pengumpulan data melalui analisis unggahan politik di media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana media sosial memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dan kontribusinya terhadap proses demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan akses informasi yang mudah dan mendukung keterlibatan publik dalam diskusi politik. Namun, penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran hoaks dan polarisasi opini, yang dapat menghambat kualitas demokrasi. Temuan ini menggarisbawahi peran penting media sosial dalam mengubah lanskap politik Indonesia, sekaligus menunjukkan perlunya literasi digital yang lebih baik untuk memitigasi dampak negatifnya.

Kata Kunci:

Demokrasi, Media Sosial, Partisipasi Politik

PENDAHULUAN

Pengetahuan masyarakat terhadap politik terlihat dari keinginan masyarakat untuk bekerja keras dibidang politik. Partisipasi politik dapat dilihat melalui partisipasi dalam pemilu, diskusi politik, acara kampanye dan lain sebagainya. Memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang politik dapat mendorong setiap orang untuk mengutarakan pendapatnya terhadap kebijakan

pemerintah yang dianggap tidak adil bagi masyarakat Indonesia (Arniti, 2020).

Media Sosial merupakan media online yang mempunyai banyak pengguna. Jejaring sosial digunakan sebagai alat untuk berbagi dan berkomunikasi satu sama lain (Puspitarini & Nuraeni, 2019, p.73). Saat ini, tidak heran jika media sosial digunakan untuk berkomunikasi atau berdiskusi tentang isu-isu politik. Hal ini memungkinkan

akses informasi melalui media sosial, akses Dimana saja dan kapan saja. Karena informasi politik disebarluaskan melalui media sosial, setiap orang mudah memahami politik Indonesia (Perangin-angin & Zainal, 2018).

Penelitian ini dilakukan, sebab partisipasi politik merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara khususnya generasi muda yang memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat. Partisipasi politik dapat ditingkatkan, salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi politik yang dapat memberikan informasi politik. Manfaat bagi peneliti dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami peran media sosial sebagai alat komunikasi politik dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa politik. Bagi peneliti lain manfaat yang diperoleh dari penelitian ini membuat peneliti lain dapat memahami referensi komunikasi politik dan keterlibatan politik.

Definisi Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik, yang mencakup pengumpulan suara, proses, dan diskusi publik. Teori Partisipasi Politik menekankan bahwa keterlibatan ini penting untuk demokrasi yang sehat, di mana masyarakat memiliki suara dalam pemerintahan dan kebijakan publik. Demokrasi, menurut Robert Dahl, adalah sistem di mana semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Keterlibatan masyarakat dalam politik tidak hanya memperkuat legitimasi pemerin-

tahan tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Sholikin, 2021, pp. 174–175). Teori relevan ini menjelaskan tentang media sosial, yaitu menurut Mandibergh, media sosial adalah media yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antar pengguna untuk membuat konten (*user-generated content*) (Kartini et al., 2022). Lebih lanjut, sistem komunikasi politik menurut Rush dan Althoff mengartikan komunikasi politik sebagai proses dimana informasi politik penting ditransfer dari satu bagian sistem politik ke bagian lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik (Andary & Lubis, 2023). Teori relevan yang terakhir mengenai partisipasi politik menurut Ramlan Subakti memberikan gambaran singkat tentang partisipasi politik sebagai wujud warga negara biasa dalam memutuskan segala keputusan yang berkaitan atau mempengaruhi kehidupannya (Julianto, 2022).

Ketika praktik digital telah menyebar (di media sosial), faksi pendukung para kandidat berlomba-lomba untuk “mencekoki ideologi” mengenai pilihan politik masyarakat saat pesta demokrasi 2024 berlangsung. Lingkup pembicaraan mengenai politik digital bukan hanya tentang bagaimana kegiatan politik direplikasi secara daring, karena politik digital tidak hanya mendukung tindakan yang telah ditentukan melainkan membuka ruang tindakan baru.

Akan sulit membayangkan bagaimana perkembangan dunia yang telah mengalami perubahan seperti dengan munculnya media sosial ternyata dapat memengaruhi tindakan-tindakan ekspresi politik di kehid-

upan ini. Kemunculan media sosial menjelaskan bahwa politik dipengaruhi oleh komunikasi digital. Hal ini meningkatkan keterlibatan warga dalam isu-isu politik yang mungkin sebelumnya hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu yang memiliki akses terhadap media konvensional seperti televisi dan surat kabar. Media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik khususnya bagi generasi muda pada pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Menurut data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, sekitar 73% dari total populasi Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial. Dari jumlah tersebut, sekitar 45% diantaranya menggunakan media sosial untuk mengikuti perkembangan politik dan berpartisipasi dalam diskusi politik online (Alen, 2023). Selain itu, survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 30% responden mengaku pernah mengikuti kampanye politik melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube memungkinkan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia untuk terlibat dalam diskusi publik secara langsung dan real-time. Hal ini meningkatkan keterlibatan warga dalam isu-isu politik yang mungkin sebelumnya hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu yang memiliki akses terhadap media konvensional seperti televisi dan surat kabar.

Adapun pokok masalah dari paper ini yang akan didalami oleh peneliti ialah berfokus pada pengaruh media sosial terhadap parti-

sipasi politik dan kualitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi mengenai bagaimana media sosial, sebagai platform interaktif dengan jangkauan yang luas, telah mengubah lanskap politik Indonesia dan apa saja dampak positif serta negatif media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik, seperti kemudahan akses informasi dan keterlibatan publik dalam diskusi politik, serta tantangan seperti penyebaran hoaks dan polarisasi opini yang dapat menghambat kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan demikian penulis dapat menarik sebuah kesimpulan, bahwa meskipun media sosial memiliki potensi untuk memperkuat partisipasi politik, tantangan yang muncul perlu dikelola untuk memastikan bahwa pengaruhnya terhadap demokrasi tetap positif.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arla Azzahra Permana dengan judul “Pengaruh Media Sosial sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa” pada tahun 2022 (Permana, 2022), penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi politik mahasiswa penting untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik. Media sosial memungkinkan mahasiswa untuk mengekspresikan partisipasi politiknya secara bebas dan menjadi ruang alternatif dalam komunikasi politik. Hal ini mempermudah politisi dan pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat, sehingga meningkatkan pemahaman politik mahasiswa yang berujung pada peningkatan partisipasi politik aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

partisipasi politik mahasiswa sangat penting untuk mendukung sistem demokrasi. Media sosial memiliki tiga peran utama dalam konteks politik, yaitu sebagai media kampanye, pengembangan melek politik mahasiswa, dan sarana peningkatan partisipasi pemilih. Platform yang paling sering digunakan untuk komunikasi politik adalah Instagram (68,6%), diikuti oleh Twitter (17,1%) dan YouTube (14,3%). Sebanyak 97,1% responden menyatakan bahwa media sosial berperan signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa, serta memberikan kebebasan untuk mengekspresikan aspirasi politik mereka. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan desain penelitian cross-sectional. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarluaskan secara daring menggunakan Google Forms kepada 35 mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2020. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengembangan kuesioner, pemilihan sampel, pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arla dan penelitian ini terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan yang signifikan dalam kesimpulan, metode penelitian, dan hasil penelitian. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam fokus pada peran media sosial terhadap partisipasi politik. Keduanya menyoroti bahwa media sosial merupakan alat komunikasi politik yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda, dalam diskusi dan aktivitas politik. Baik penelitian pertama maupun kedua men-

egaskan bahwa media sosial memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi politik dan mendukung demokrasi dengan mendorong dialog publik. Selain itu, kedua penelitian juga mencatat tantangan yang ditimbulkan oleh media sosial, seperti penyebaran hoaks dan polarisasi opini, yang dapat menghambat kualitas demokrasi.

Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam pendekatan dan lingkup penelitian. Penelitian pertama lebih berfokus pada pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa di lingkungan kampus, menggunakan metode survei dengan kuesioner pada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Sedangkan penelitian kedua memiliki cakupan yang lebih luas, membahas dampak media sosial terhadap partisipasi politik masyarakat umum dan demokrasi di Indonesia, dengan metode analisis konten terhadap unggahan politik di media sosial. Selain itu, penelitian pertama menekankan peran media sosial sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengekspresikan aspirasi politik, sedangkan penelitian kedua juga membahas tantangan global seperti algoritma media sosial yang menciptakan *echo chambers* dan penyebaran hoaks dalam konteks politik nasional.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah fondasi dari demokrasi yang berfungsi baik, yang melibatkan warga negara secara aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan

yang memengaruhi kehidupan mereka. Huntington dan Nelson menggambarkan partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan memengaruhi kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Bentuk-bentuk partisipasi politik bervariasi, mulai dari memilih dalam pemilu, berdiskusi tentang politik, menghadiri kampanye, hingga menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan. Partisipasi yang tinggi dianggap sebagai tanda bahwa masyarakat tertarik dan memahami politik, sementara partisipasi rendah sering kali dilihat sebagai indikasi rendahnya kesadaran politik (Yunus et al., 2017).

Teori Komunikasi Politik

Media sosial dalam konteks komunikasi politik menawarkan ruang yang interaktif di mana pengguna dapat menciptakan dan mendistribusikan konten secara mandiri atau kolaboratif, sesuai dengan teori komunikasi politik yang diajukan oleh para ahli seperti Mandibergh. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube memungkinkan pengguna untuk menyampaikan pendapat, membahas isu-isu politik, dan berinteraksi secara langsung dengan tokoh politik serta masyarakat lainnya. Berbeda dengan media konvensional yang memiliki batasan dalam kontrol informasi, media sosial menghadirkan arus informasi yang lebih bebas dan terbuka, sehingga siapa saja dapat mengambil bagian dalam diskusi politik. Teori ini menggarisbawahi peran media sosial dalam menyediakan platform yang inklusif untuk berinteraksi, membagikan

pandangan politik, dan membentuk opini publik (Permana, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan analisis konten untuk meneliti aktivitas politik di media sosial, khususnya terkait dengan peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis konten dari unggahan dan diskusi politik di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi pola komunikasi politik di media sosial tentang bagaimana media sosial telah membentuk perilaku politik masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada bulan september 2024, menjelang pemilu akan diselenggarakan. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis konten dari unggahan dan diskusi politik di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi pola komunikasi politik di media sosial tentang bagaimana media sosial telah membentuk perilaku politik masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik

Pengaruh media adalah seberapa sering informasi tertentu muncul di berbagai platform media, seperti surat kabar, televisi, radio, atau online. Hal ini mencakup seberapa banyak informasi itu dilihat dan

dipahami oleh khalayak ramai. Pengaruh media bisa menjadi petunjuk penting untuk mengetahui seberapa besar dampak suatu informasi pada Masyarakat (Saud et al., 2020).

Media sosial telah menjadi sarana partisipasi politik yang demokratis, memberikan akses dan interaksi bagi individu untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, mengutarakan pendapat politiknya, dan berpartisipasi dalam partai politik. Revolusi ini telah mengubah lanskap partisipasi politik dengan memberikan suara kepada masyarakat yang sebelumnya terbatas dalam menyediakan.

Partisipasi politik merupakan bagian penting dari demokrasi. Partisipasi dalam politik merupakan ciri politik modern. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah mempengaruhi dan mempengaruhi kehidupan warganegara, maka mereka mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas yang dilakukan warga negara dengan tujuan mempengaruhi keputusan pemerintah (Huntington, 1994, p. 4). Lebih lanjut, Huntington dan Nelson menjelaskan bahwa keterlibatan politik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti berpartisipasi dalam pemungutan suara, menghubungi pejabat pemerintah dan pemimpin politik untuk mempengaruhi kepentingan orang banyak, yang kita sebut dengan lobbying, yang memiliki peran sebagai anggota atau pegawai suatu kelompok dengan tujuan mempengaruhi

keputusan pemerintah, menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah, dan umumnya hanya menguntungkan satu atau hanya beberapa orang dan bersifat agresif untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dengan merugikan badan tersebut kepada manusia dan harta benda (Huntington, 1994). Oleh karena itu, partisipasi dalam politik adalah kegiatan warga negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi penyelenggaraan negara melalui berbagai Tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, bergabung dengan kelompok kepentingan atau lembaga politik, mencari calon dan/atau mencalonkan diri sebagai pengorganisir Masyarakat, berkomunikasi dengan pejabat negara, protes, kampanye, dll.

Analisis data menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam kampanye politik memberikan pengaruh positif terhadap politik. Orang-orang yang menggunakan alat media sosial terlibat dalam diskusi politik, berbagi informasi politik, dan berpartisipasi dalam jajak pendapat. Dengan menggunakan Media Sosial sebagai cara untuk mengungkapkan ide dan menyampaikan, orang-orang ini mendukung dan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki kepentingan politik serupa. Oleh karena itu, media sosial menyediakan platform yang memungkinkan akses lebih besar terhadap politik dan akses terhadap masyarakat (Farid, 2023). Pemilu 2019 di Indonesia merupakan salah satu contoh yang menarik tentang bagaimana media sosial memainkan peran besar dalam kampanye politik. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube dijadikan

alat utama untuk menyebarkan informasi, memobilisasi massa, dan mengarahkan opini publik. Berikut adalah beberapa contoh konkret dan statistik yang menunjukkan pengaruh media sosial dalam Pemilu 2019:

Penggunaan Media Sosial sebagai Alat Kampanye

Pada Pemilu 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 150 juta orang, dengan sekitar 130 juta di antaranya adalah pengguna aktif media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp adalah yang paling populer dan dimanfaatkan secara ekstensif oleh kedua kubu calon presiden. Menurut laporan We Are Social, pengguna Facebook di Indonesia mencapai 130 juta, sedangkan Instagram memiliki 62 juta pengguna aktif, dan Twitter sekitar 10 juta pengguna. Fakta ini mendorong tim kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi untuk memanfaatkan platform ini sebagai jalur utama dalam menyebarkan visi, misi, serta program kerja mereka kepada masyarakat (Hariyanto, 2024).

Strategi Kampanye dan Targeting Audiens

Kedua kubu kampanye, baik pasangan Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi, memanfaatkan analitik media sosial untuk menargetkan segmen pemilih yang berbeda. Mereka menggunakan teknik *microtargeting* untuk menyesuaikan pesan kampanye berdasarkan demografi, wilayah, dan minat pengguna. Sebagai contoh, pasangan Prabowo-Sandi banyak memanfaatkan platform seperti Instagram untuk menjangkau pemilih muda, sedangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf cenderung aktif di Facebo-

ok, yang memiliki pengguna lebih luas di berbagai usia (Fahlevi, 2022, pp. 1–26). Pada masa kampanye, tim Jokowi-Ma'ruf aktif mengunggah berbagai pencapaian dan rencana pembangunan, sedangkan tim Prabowo-Sandi menggunakan media sosial untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dengan fokus pada isu-isu ekonomi dan kemandirian.

Konten Viral dan Efeknya Terhadap Opini Publik

Selain kampanye positif, kedua kubu juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten viral yang terkadang memuat isu-isu sensitif atau kontroversial. Misalnya, berbagai video pendek, infografis, dan *meme* politik bertebaran di Facebook, Instagram, dan WhatsApp, seringkali diiringi dengan tagar (#) tertentu agar mudah ditemukan dan tersebar. Menurut survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI/BRIN), sekitar 90% pemilih di Indonesia mengatakan bahwa mereka menerima informasi terkait Pemilu melalui media sosial, dan lebih dari 70% menyatakan informasi yang mereka terima dapat mempengaruhi opini politik mereka (Prayogi & Fahadayna, 2024).

Isu Hoaks dan Disinformasi

Pemilu 2019 juga dikenal dengan maraknya hoaks yang tersebar di media sosial, yang diduga kuat memengaruhi persepsi publik. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam periode Januari-April 2019, lebih dari 500 berita hoaks terkait Pemilu tersebar di berbagai platform media sosial. Isu-isu ini mulai dari tuduhan kecurangan, ke-

bijakan kontroversial yang dianggap berbahaya, hingga berita palsu tentang kondisi kesehatan kandidat (Kominfo, n.d.) Survei yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (*Mafindo*) mengungkapkan bahwa sekitar 44% masyarakat pernah menerima informasi hoaks selama masa kampanye, dan sebagian dari mereka sempat mempercayai informasi tersebut sebelum memverifikasinya (Nadzir et al., 2019).

Ada beberapa dampak positif dalam pengaruh media sosial dalam ranah politik. (Sari et al., 2024) *Pertama*, analisis data menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan media politik berdampak positif terhadap partisipasi politik, mendorong Masyarakat untuk lebih aktif berdiskusi tentang politik, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam proses pemilu. *Kedua*, penggunaan media sosial juga mempengaruhi opini publik mengenai isu-isu politik dan kandidat, menjadi saluran penting untuk menyebarkan informasi politik dan membentuk opini publik. Namun, dibalik manfaatnya yang besar, penggunaan media sosial juga menimbulkan banyak tantangan, seperti informasi palsu atau misinformasi, serta adanya *filter bubble* dan ruang gema/*echo chamber* yang dapat menghalangi masyarakat untuk berpikir berbeda-beda, dapat menyebabkan polarisasi dan mengurangi pemahaman umum terhadap isu-isu politik. *Ketiga*, penggunaan media sosial memfasilitasi komunikasi dua arah antara politisi dan pemilih, mempererat hubungan keduanya, dan mendorong partisipasi politik pemerintah daerah pemilihan (Siringo-ringo & Ivanna, 2024).

Secara umum, menurut data yang didapat oleh peneliti ada sekitar sepertiga orang percaya bahwa informasi yang mereka terima dari media sosial membantu mereka membuat atau mengubah keputusan. Media sosial juga merupakan strategi kampanye politik yang penting. Kampanye politik dan media sosial memperluas jangkauan informasi politik dan memperkuat hubungan antara kandidat dan pemilih. Media sosial dijadikan sebagai strategi komunikasi politik adalah merupakan relatif baru dan menjadi fenomena hangat hingga kini. Strategi komunikasi politik tersebut salah satunya adalah penggunaan media sosial YouTube sebagai media utama yang digunakan untuk kampanye para capres dan cawapres dalam melakukan persuasif dan pendekatan emosional kepada masyarakat khususnya generasi Z dan Milenial di Indonesia (Putricia et al., 2024).

Karena pesan politik yang tidak terkendali dan cara-cara agresif dapat merusak citra seseorang, kampanye politik dan media sosial juga dapat menjadi tidak produktif. Media sosial telah mengubah cara kampanye politik dilakukan, opini publik, dan bahkan hasil pemilu. Penggunaan media sosial dalam pemilu dapat membantu meningkatkan partisipasi politik, dan media politik juga dapat menjangkau masyarakat dengan lebih cepat. Selain itu, media politik dapat meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda, terutama Gen Z, yang sebelumnya mungkin kurang tertarik atau terlibat dalam politik.

Di era digital sekarang ini, tantangan muncul ketika media sosial menyebarkan info-

rmasi palsu/menipu, memberikan Gambar yang keliru, dan memanipulasi. Propaganda dan serangan pribadi terhadap mereka yang ingin bertindak dapat menyebar dengan cepat di platform ini, menggunakan informasi yang salah untuk mempengaruhi opini publik. Hal ini dapat merusak kandidat-kandidat dan mempengaruhi keputusan pemilih tanpa dasar yang kuat, sementara platform algoritma memaparkan pengguna pada pendapat serupa sehingga menyebabkan kelelahan. Tantangan lain muncul Ketika konten yang disajikan tidak diperiksa atau bermuatan emosional, menyinggung dibandingkan informatif. Kita harus mewaspadai media sosial, pesan video yang dikirimkan terpotong atau hanya Sebagian dari video yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, kebijakan platform mengatur setiap algoritma sosial (Putricia et al., 2024).

Dengan demikian media sosial sangat memiliki peranan besar dan pengaruh dalam konteks politik. Media sosial memainkan peran krusial dalam berbagai aspek seperti mobilisasi dan partisipasi politik, Sumber informasi dan diskusi politik, Alat pemantauan dan analisis politik, sehingga menjadikannya alat yang sangat penting bagi para kandidat, partai politik, dan pemilih. Hal tersebut membuktikan bahwa media sosial berhubungan erat pada cara pandang masyarakat terhadap politik dan mempengaruhi sejumlah masyarakat termasuk generasi muda Z dalam berpartisipasi pada dunia politik.

Pengaruh Media Sosial terhadap Demokrasi

Dalam beberapa dekade terakhir, media sosial telah menjadi salah satu elemen paling berpengaruh dalam masyarakat, tidak terkecuali dalam proses demokrasi di Indonesia. Media sosial menawarkan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam dialog publik, berinteraksi langsung dengan tokoh politik, serta menyampaikan opini mereka dengan lebih mudah dan terbuka. Namun, di balik segala peluang tersebut, ada sejumlah tantangan serius yang juga muncul seiring dengan penggunaan media sosial dalam konteks demokrasi (Budiatri & Wiratman, 2022). Media sosial telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses politik di Indonesia, terutama dalam hal keterbukaan dan aksesibilitas. Dengan populasi yang besar dan tersebar, platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube berperan penting dalam menjembatani kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan warga dari berbagai pelosok untuk terlibat dalam diskusi publik secara langsung dan real-time. Media sosial juga menjadi saluran alternatif yang relatif bebas dari pengawasan ketat pemerintah, memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan pendapat mereka secara lebih terbuka, baik dalam mendukung maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini memperkuat prinsip dasar demokrasi berupa kebebasan berekspresi, terutama di tengah konteks Indonesia di mana kebebasan berekspresi terkadang dibatasi oleh tekanan politik dan sosial (Tamara, 2021).

Media sosial, meskipun membawa keterbukaan, juga menghadirkan tantangan serius bagi demokrasi di Indonesia, terutama melalui fenomena *echo chambers* dan penyebaran fake news. *Echo chambers* menciptakan ruang dialog yang sempit dimana orang cenderung hanya berinteraksi dengan mereka yang berpandangan sama, terutama terlihat selama pemilu dan pilkada, yang mengakibatkan polarisasi dan menghambat perdebatan konstruktif. Masalah ini diperparah dengan penyebaran fake news yang menjadi isu utama dalam berbagai momentum politik seperti Pilpres 2014 dan 2019 serta Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana informasi palsu sering digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik. Situasi ini semakin kompleks karena algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten yang menarik perhatian tanpa memperhatikan validitas informasi, ditambah dengan tingkat literasi media yang masih relatif rendah di Indonesia, yang mengakibatkan penyebaran hoaks secara masif dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi (Dianti et al., 2020).

Media sosial telah menjadi instrumen kampanye politik yang semakin penting di Indonesia, terutama sejak Pemilu 2014, 2019, dan Pilkada DKI Jakarta 2017, karena menawarkan platform kampanye yang lebih murah dan efektif dibandingkan metode tradisional (Zaki et al., 2023). Dalam Pilpres 2014 dan 2019, media sosial menjadi arena pertarungan sengit antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, meskipun sayangnya juga digunakan untuk menyebarkan berita palsu

dan serangan pribadi. Fenomena ini mencapai puncaknya pada Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana penggunaan isu agama dan etnis di media sosial memicu ketegangan politik yang kuat dan mempengaruhi elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama. Namun demikian, media sosial juga membawa dampak positif dengan mendorong partisipasi politik yang lebih besar, terutama di kalangan generasi milenial dan generasi Z yang lebih aktif di platform digital, sehingga kandidat yang mampu memanfaatkan media sosial secara efektif cenderung lebih berhasil menarik perhatian pemilih muda.

Secara keseluruhan, penggunaan media sosial berperan penting dalam menentukan arah opini publik selama masa kampanye Pemilu 2019. Laporan dari *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) menyatakan bahwa media sosial telah menguatkan *polarization* (polarisasi) dalam politik Indonesia, dengan masing-masing kelompok pendukung semakin kokoh dalam dukungannya. Keterlibatan langsung calon presiden dan wakil presiden dalam kampanye digital juga meningkatkan kepercayaan pemilih bahwa mereka lebih dekat dengan figur yang dipilih. Beberapa influencer dan tokoh masyarakat diundang untuk mempromosikan kandidat tertentu di media sosial, membuat pesan kampanye tersebar lebih luas dan mencapai kalangan pemilih yang lebih luas, terutama generasi milenial dan Gen Z yang merupakan pengguna aktif media sosial (Maulana & Situngkir, 2020).

Penggunaan media sosial oleh politisi dan partai politik di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kesadaran akan pentingnya platform ini dalam kampanye politik. Melalui media sosial, politisi dapat berkomunikasi langsung dengan pemilih tanpa perantara media tradisional. Hal ini memungkinkan politisi untuk membentuk citra lebih personal dan dekat dengan masyarakat. Selain itu, media sosial memberikan fleksibilitas bagi politisi dalam merespons isu-isu politik secara cepat dan efektif, seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik terkemuka seperti Joko Widodo dan Anies Baswedan (Zaki et al., 2023). Partai politik juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan visi dan platform mereka kepada khalayak yang lebih luas, terutama pemilih muda. Beberapa partai besar di Indonesia bahkan telah membentuk tim khusus untuk mengolah kampanye digital mereka, memanfaatkan berbagai alat seperti iklan berbayar di media sosial. Meski demikian, tantangan besar yang dihadapi adalah memastikan informasi yang disebarakan akurat dan tidak menyesatkan. Untuk mengatasi hal ini, KPU bekerja sama dengan platform media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks selama pemilu dan memastikan informasi resmi tersebar dengan baik.

Rekonstruksi Meningkatkan Partisipasi Politik dan Kualitas Demokrasi

Sistem demokrasi sangat bergantung pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti kegiatan pemilu yang dilaksanakan dalam 5 tahun sekali. Masyarakat sangat dituntut untuk

melakukan partisipasi aktif dalam berbagai aktivitas politik yang bertujuan untuk memajukan dalam sistem demokrasi (Safitri et al., 2024).

Adapun upaya untuk melakukan strategi peningkatan dalam partisipasi politik masyarakat yang melibatkan berbagai kepentingan, termasuk individu, pemerintah, lembaga akademisi, dan platform media sosial yaitu:

Peningkatan Literasi Digital

Di lingkungan akademik formal maupun nonformal, pendidikan dan pelatihan literasi digital harus ditingkatkan. Selain itu, kemampuan berpikir kritis ini membantu mereka menganalisis sumber informasi, memahami bagaimana algoritma penyebaran informasi di media sosial mempengaruhi konten yang mereka lihat, dan mengidentifikasi informasi yang salah dan tidak valid atau palsu.

Promosi Diversitas Pandangan Politik

Jejaring media sosial dapat membantu mempromosikan perspektif politik yang beragam. Ini dapat dicapai dengan mengubah algoritma yang mengatur tampilan konten di jejaring media sosial untuk menampilkan konten politik yang berbeda dan menarik perhatian masyarakat.

Kolaborasi antara Platform Media Sosial dan Pemerintah

Kerja sama antara pemerintah dan platform media sosial juga dapat membantu mengurangi efek negatif penggunaan media sosial dalam konteks politik. Platform media sosial dapat mendukung pemerintah

untuk menghapus konten palsu, hoaks, dan ilegal, serta konten yang memicu kebencian politik. Kebijakan ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap konten yang ada di platform.

Pembentukan Kesadaran Publik

Pendidikan masyarakat tentang bahaya media sosial dan efek negatif penggunaan media sosial dalam politik dapat sangat penting. Masyarakat akan menjadi lebih sadar akan dampak penggunaan media sosial, sehingga mereka dapat menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih kritis terhadap penggunaan media sosial. Proses politik yang disebarluaskan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, diskusi panel, seminar, dan konten online, dapat dipengaruhi oleh informasi yang akurat tentang konten jejaring sosial.

Regulasi yang Tepat

Pemerintah memiliki otoritas untuk mengontrol penggunaan media sosial dalam hal politik. Kebebasan berekspresi harus dilindungi dengan undang-undang. Tetapi untuk mencegah tujuan politik menjadi tidak sehat atau dipandang negatif, undang-undang harus dibuat untuk mengontrol praktik yang merugikan seperti hoaks dan palsu, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan jejaring media sosial (Dwiyanti et al., 2023).

Budaya literasi akademis mungkin diperlukan agar masyarakat memiliki sikap yang kritis terhadap semua informasi dan hubungan yang ada. Masyarakat harus diberi edukasi tentang aturan yang harus dipatuhi dalam menggunakan jejaring me-

dia sosial sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan kesadaran di kalangan generasi muda dalam mengakses informasi yang disajikan oleh media massa. Pendidikan digital juga dapat mencakup serangkaian kegiatan literasi media yang dirancang untuk meningkatkan kontrol individu terhadap media yang mereka gunakan. Setiap studi mengenai teknologi baru mempengaruhi cara mencari informasi dan berinteraksi. Terdapat tiga pengetahuan dan tujuan pentingnya dalam media massa yang diberikan kepada peserta pelatihan, antara lain: *pertama*, pemikiran yang kritis untuk mengembangkan media evaluasi massa yang mandiri; *Kedua*, memiliki sebuah kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat; dan *Ketiga*, pemahaman tentang tanggung jawab etika dan moral media profesional (Silvana & Darmawan, 2018).

Salah satu tantangan utama dalam informasi di era digital ini adalah penyebaran berita palsu atau juga bisa disebut hoaks. Dengan mudahnya akses masuk dalam era digital membuat dan penyebaran informasi di platform jejaring media sosial, hoaks juga dengan cepat menyebar dan mempengaruhi opini publik. Hal ini dapat mengancam integritas demokrasi, karena informasi yang tidak valid atau tidak benar dapat mempengaruhi pememilihan umum, debat politik, dan keputusan publik lainnya. Dalam tantangan-tantangan ini juga sangat diperlukan solusi dalam pengelolaan informasi di era digital. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah meningkatkan literasi digital dan media khusus-

nya bagi masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana cara memverifikasi atau mengidentifikasi sebuah informasi, mengenali informasi hoaks secara mendalam, dan memahami bagaimana data pribadi mereka digunakan. Oleh karena itu, masyarakat dapat menjadi lebih kritis dan waspada terhadap informasi yang mereka temui di dunia digital.

Selain itu, perlu juga adanya keterlibatan dalam pemerintah dalam mengatasi krisis demokrasi di era digital. Kerja sama dalam berbagai pihak dapat membantu mengatasi tantangan yang ada dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat melindungi integritas demokrasi dalam era digital. Pemerintah dan perusahaan teknologi perlu lebih terbuka tentang cara mereka mengolah data, serta bagaimana cara mereka menghadapi isu penyebaran hoaks dalam politik. Hal ini juga penting dalam memperkuat kerja sama internasional dalam mengatasi krisis demokrasi di era digital. Tantangan yang dihadapi oleh satu negara sering kali juga menjadi masalah global yang memerlukan solusi bersama. Melalui kerjasama internasional, negara-negara dapat bertukar pengalaman, berbagi sumber daya, dan mengembangkan standar global yang dapat membantu melindungi integritas demokrasi di seluruh dunia.

Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam mengatasi Krisis demokrasi di era digital. Masyarakat harus didorong untuk menjadi lebih kritis dalam menghadapi dari informasi hoaks yang mereka temukan di media sosial. Serta berperan aktif

dalam melaporkan konten yang diragukan dan mengikuti sumber sumber terpercaya. Hal ini dapat membantu membangun lingkungan informasi yang sehat. Selanjutnya, Langkah Langkah untuk mengatasi krisis demokrasi dalam era digital, penting juga untuk memperkuat kerja sama lintas batas antara negara dan Lembaga internasional. Kerja sama internasional dapat mencakup pertukaran informasi dan pengalaman, pembentukan standar global, dan koordinasi dalam penanggulangan tindakan yang merugikan integritas demokrasi (Gea, 2023).

KESIMPULAN

Pengaruh media adalah seberapa sering informasi tertentu muncul di berbagai platform media, seperti surat kabar, televisi, radio, atau online. Hal ini mencakup seberapa banyak informasi itu dilihat dan dipahami oleh khalayak ramai. Pengaruh media bisa menjadi petunjuk penting untuk mengetahui seberapa besar dampak suatu informasi pada Masyarakat.

Media sosial telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses politik di Indonesia, terutama dalam hal keterbukaan dan aksesibilitas. Dengan populasi yang besar dan tersebar, platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube berperan penting dalam menjembatani kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan warga dari berbagai pelosok untuk terlibat dalam diskusi publik secara langsung dan real-time.

Sistem demokrasi sangat bergantung pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti kegiatan pemilu yang dilaksanakan dalam 5 tahun sekali. Masyarakat sangat dituntut untuk melakukan partisipasi aktif dalam berbagai aktivitas politik yang bertujuan untuk memajukan dalam sistem demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alen, N. P. (2023). Transformasi media sosial dalam kompetensi komunikasi politik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 5101–5109.
- Andary, R. W., & Lubis, K. (2023). Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 9(4), 12-16.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329–348.
- Budiatri, A. P., & Wiratman, H. (2022). *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. LP3ES.
- Dianti, P., Waluyati, S. A., & Fatihah, H. (2020). Analisis Dampak Potensial Penggunaan Buku Ajar Pendidikan Demokrasi Berbasis Nilai Dalam Mengembangkan Sikap Demokratis Mahasiswa. *Jurnal Civiv Hukum*, 5(1), 75–85.
- Dwiyanti, D. A., Nurani, I., Alfarizi, M. N., & Hubbah, R. D. (2023). Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Warga Negara: Dampak Positif dan Negatif. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 298–306.
- Fahlevi, R. (2022). Kampanye Capres dan Cawapres Pada Pemilu 2019: Efektivitas Penggunaan Buzzer di Media Sosial. *Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal (JPRMEDCOM)*, 4(1).
- Farid, A. S. (2023). Penggunaan media sosial dalam kampanye politik dan dampaknya terhadap partisipasi politik dan persepsi publik. *QAULAN: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), 45–50.
- Gea, F. (2023). Krisis Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Informasi. *Literacy Notes*, 1(2), 1–12.
- Hariyanto. (2024). Alienasi Digital di Indonesia: Analisis Pemikiran Karl Marx dan Dampak Sosial Media Terhadap Alienasi Manusia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7), 25-34.
- Huntington, S. P. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Rineka Cipta.
- Julianto, N. D. (2022). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Kartini, K., Harahap, I. A., Arwana, N. Y.,

- & Rambe, S. (2022). Teori dalam Penelitian Media. *Jurnal Edukasi Nonformal* 3(2), 138-140.
- Kominfo, P. (n.d.). *No Title*.
- Maulana, A., & Situngkir, H. (2020). Media polarization on Twitter during 2019 Indonesian election. In *International Conference on Complex Networks and Their Applications* (pp. 660-670). Cham: Springer International Publishing.
- Nadzir, I., Seftiani, S., & Permana, Y. S. (2019). *Hoax and misinformation in Indonesia: insights from a nationwide survey*. ISEAS.
- Perangin-angin, L. L. K., & Zainal, M. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam bingkai jejaring sosial di media sosial. *Jurnal Aspikom*, 3(4), 737-754.
- Permana, A. A. (2022). Pengaruh Media Sosial sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(5), 200-209.
- Prayogi, D., & Fahadayna, A. C. (2024). Religious Identity Politics In Indonesia's 2019 Election Campaign On Twitter And Its Socio-Political Implications. *Jurnal Penelitian Politik*, 20(2), 95-106.
- Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi. *Jurnal Common*, 3(1), 71-80.
- Putricia, N. D., Febriyanti, A. I., Puteri, N. D., Syukriya, A. R., & Puspita, A. M. I. (2024). Studi Literatur: Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Gen Z (Zoomers). *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 74-82.
- Safitri, B., Chumaedy, A., Aditya, T., & Fadli, Y. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 7(2), 304-325.
- Sari, W. P., Putriana, M., Wihadi, A., Firdaus, M. R., Pamungkas, B. F., Reyfaldi, R. A., Sadewo, R., & Bachtera, R. A. (2024). Analisis Pengaruh Terpaan Media Sosial TikTok terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2024: Pendekatan Kuantitatif. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1255-1264.
- Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Ashfaq, A., & Ahmad, A. R. (2020). Media sosial dan digitalisasi partisipasi politik pada generasi muda: perspektif Indonesia. *Jurnal Society*, 8(1), 87-97.
- Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(02), 168-184.
- Silvana, H., & Darmawan, C. (2018). Pendidikan literasi digital di kalangan usia muda di Kota Bandung. *Pedagogia*, 16(2), 146-156.
- Siringoringo, A. C., & Ivanna, J. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap

Politik di Desa Holbung, Kecamatan Sitiotio, Kabupaten Samosir. *Journal on Education*, 6(4), 18741–18747.

Tamara, N. (2021). *Demokrasi di era digital*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yunus, N. R., Sholeh, M., & Susilowati, I. (2017). Rekonstruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 4(3), 289–302.

Zaki, M., Rafsanjani, D. R., Hutabarat, D. A., Hidayah, B., & Radianto, D. O. (2023). Sosialisme Demokratis dalam Kebhinekaan Indonesia. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(3), 558–569.